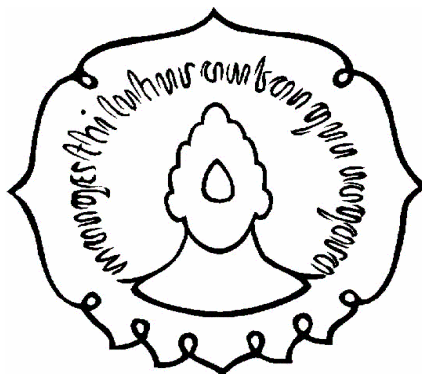


**EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006-2008**



TUGAS AKHIR

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan**

Oleh:

FENDI WIBOWO

NIM F3406031

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul "EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006-2008" telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan FE UNS.

Surakarta, 11 Agustus 2009

Telah disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Drs. Jaka Winarna, MSI., Ak
NIP. 196609191992031001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi

Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Perpajakan

Surakarta,

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Arum Kusumaningdyah A., SE, M.M, Ak (.....)

NRP. 340 700 002

Penguji

2. Drs Jaka Winarna, MSI., Ak (.....)

NIP. 196609191992031001

Dosen Pembimbing

MOTTO

“Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri adalah sumber seni sejati dan semua ilmu pengetahuan”

Albert Einstein

“Hidup adalah perjuangan serta keberanian dalam menghadapi pilihan dan kenyataan yang kadang menyakitkan, masa lalu adalah kenangan untuk bercermin dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dimasa depan.”

Penulis

“Nasib hujan membasahi, Bumi yang meresapi. Hakekat siswa belajar, dan Guru mengajar. Seperti semua yang terjadi, tak ada yang abadi. Ada awal ada akhir, ada hidup ada mati.”

Penulis

“Sebalok kayu biasa, telah kau rubah jadi indah dengan ukiran-ukirannya. Tak terhingga jasa pengukir itu. Kadang marah karena kayu itu keras dan susah diukir. Tapi ia tetap berusaha. kelak kayu-kayu itu akan berpindah, dia berharap kelak kayu-kayunya dapat terjual mahal.”

Penulis

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini

Kepada :

1. Allah SWT pemilik hidup dan matiku, mantapkan hatiku untuk menjalani takdirku serta kuatkanlah aku dalam Islam dan iman.
2. Ibu dan Ayah tercinta, atas segala doa dan kasih sayang.
3. Kakak-kakak dan adikku tercinta yang aku sayangi, aku cintai, dan aku banggakan.
4. Semua teman dan sahabatku yang telah memberi berjuta kenangan.
5. Cita - citaku dan keberhasilan yang menunggu di depan sana.
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006-2008”**.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data yang diambil dalam penelitian di instansi yang bersangkutan. Tugas Akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak, Selaku ketua Program Diploma III Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sri Suranta, SE, M.Si., Ak, Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak, Selaku Pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Semua pegawai dan staf DPPKA yang telah banyak membantu kelancaran Tugas Akhir ini.
 7. Bapak dan Ibu ku, terima kasih atas doa, perhatian, semangat dan kepercayaannya. Maaf kalau sering membuat kalian memikirkanku setiap hari karena aku sering maen dan nginep.
 8. Kakak-kakak dan adikku, yang selalu memberi semangat.
 9. AD 3545 BT dan Laptopku tersayang, yang selalu menemani selama pembuatan Tugas Akhir ini.
 10. Temanku Juwita Ariesa yang sering membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
 11. Temanku Gompil yang sering menemaniku sekaligus membuatku pusing.
 12. Teman-teman Kost AN_NUR, atas dukungannya dan semangat untuk tidak malas mengerjakan Tugas Akhir.
 13. Teman-teman ku semuanya yang tidak bisa di sebut satu-satu.
 14. Anak-anak pajak 2006 semua khususnya Kelas A, terima kasih atas bantuan dan motivasi selama ini.
 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir.
- Pada akhirnya Karya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 7 Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB

I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta.....	1
2. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta.....	7
B. LATAR BELAKANG.....	13
C. RUMUSAN MASALAH.....	15

D. TUJUAN PENELITIAN.....	16
E. MANFAAT PENELITIAN.....	16
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	17
II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. LANDASAN TEORI.....	19
1. Pajak Secara Umum.....	19
2. Pengertian Pajak Daerah.....	22
3. Pengertian Pajak Reklame.....	24
B. PEMBAHASAN.....	33
1. Analisis Target Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	33
2. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	34
3. Hambatan yang Ditemui DPPKA Surakarta dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.....	36
4. Upaya yang Dilakukan oleh DPPKA Surakarta dalam Usaha Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame.....	38
III. TEMUAN	
A. KEBAIKAN.....	41
B. KELEMAHAN.....	41
IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	43
B. SARAN.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
II.1 Ratio Target Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006-2008.....	33
II.2 Ratio Kontribusi dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006-2008.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Magang di DPPKA Surakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 tahun 1999.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

ABSTRACT

ADVERTISEMENT TAX CONTRIBUTION EVALUATION TO EARNINGS of TOWN AREA ORIGINAL SURAKARTA YEAR BUDGET 2006-2008

FENDI WIBOWO

F3406031

Area tax is source of earnings of important area to finance the management of local government and development of area to settle wide area autonomy, reality, and dynamic. Advertisement is one of source of earnings of area original especially area tax sector having potency enough big and good for development of area especially at Surakarta city.

Intention of this research is to know effectivity target of budget compared to realization of earnings of area original, to know evaluation of contribution of advertisement tax to earnings of area original Surakarta city, to know resistances met in doing advertisement tax imporser, and know effort gone through in increasing contribution of advertisement tax. Data collecting technique applies observation technique, interview, documentation, and book study done by writer in DPPKA Surakarta city.

System applied by DPPKA in imposing the tax advertisement is system as of self assesment, this tax imporser more emphasizing atly is livelines of taxpayer in fulfilling and executes obligation of its (the taxation). From analysis can be told that revenue effectivity of area original experiences fluctuation or mike to alight from year to year and realization of acceptance receiving of advertisement tax experiences downdraft from the year 2006 up to 2008. In doing collector DPPKA to meet resistances in the form of resistance from outside and also resistance from within. While effort gone through to increase collector by the way of delivering complete equipments for unloading of advertisement which expired has, forms settlement team of advertisement to arrange in order advertisement, and gives counselling to Advertisement taxpayer that more understandingly and understands about procedure and licensing mechanism and payment of advertisement tax.

Keywords : Advertisement Tax and Original Regional Income

ABSTRAKSI

EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006-2008

FENDI WIBOWO
F3406031

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan dinamis. Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pajak daerah yang mempunyai potensi cukup besar dan berguna bagi pembangunan daerah khususnya pada Kota Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas target anggaran dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, untuk mengetahui evaluasi kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan pemungutan pajak reklame, dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam meningkatkan kontribusi pajak reklame. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang dilakukan penulis di DPPKA Kota Surakarta.

Sistem yang digunakan DPPKA dalam memungut pajak reklame adalah sistem *self assesment*, pemungutan pajak ini lebih menekankan pada keaktifan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari analisis dapat dikatakan bahwa efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun dan realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Dalam melakukan pemungutan DPPKA menemui hambatan-hambatan berupa hambatan dari luar maupun hambatan dari dalam. Sedangkan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemungutan dengan cara mendatangkan peralatan yang lengkap untuk pembongkaran reklame yang sudah kadaluarsa, membentuk tim penataan reklame untuk menertibkan reklame, dan memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak reklame agar lebih paham dan mengerti tentang prosedur dan mekanisme perijinan serta pembayaran pajak reklame.

Kata kunci : Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta

Wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas maka tidak mungkin jika segala sesuatu diurus oleh pemerintah pusat. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan sampai ke pelosok daerah maka perlu dibentuk suatu Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sama halnya dengan pemerintah pusat memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan jalannya pemerintahan. Penerimaan pemerintah dapat menjadi sumber untuk membiayai kegiatan pemerintahan, untuk itu pemerintah selalu berusaha menggali sumber dana untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah dinas daerah adalah unsur pelaksana daerah, salah satu dinas daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset. Untuk melaksanakan urusan rumah tangga sendiri Pemerintah Daerah mempunyai hak-hak untuk menggali pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset, Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta

tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah daerah Surakarta sebagai daerah otonom.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D yang menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan dan dibentuk Daerah baru dengan nama kota Surakarta.

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi *Haminte* Kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu terdiri dari 5 wilayah Kecamatan dan 44 Kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Karanganyar belum diserahkan. Baru pada tanggal 9 September 1950 terjadi penyerahan 9 kelurahan tersebut. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan tersebut antara lain Jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan, P & K, Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Penerimaan Daerah diurus oleh jawatan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DPRS Kota Besar Surakarta No. 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum ini terbagi dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan ini ada bagian-bagian.

Dengan adanya perubahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No. 259/X.10/Kp. 70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta, urusan-urusan dari dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak.

Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162 / Kep. / Kdh.IV.Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset yang kemudian sering disingkat DPPKA. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu DPPKA dibagi menjadi empat seksi yaitu seksi Umum, seksi Pajak Daerah, seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan seksi Doleansi/P3 dan Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKA.

Tugas pokok DPPKA pada waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota dibidang Perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41-101 Tahun 1978 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset. Struktur Organisasi DPPKA disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri mulai Perda No. 23 Tahun 1981. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di Kota Surakarta dengan terbitnya Perda No. 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta.

1) Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kotamadya Surakarta adalah unsur pelaksana dibidang Pendapatan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta.

2) Tugas Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.

DPPKA Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Perda No. 24 Tahun 2001 Bab III, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikota Surakarta.

3) Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha.
- c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak (WP) Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
- e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak, serta membantu melakukan penyampaian

Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada Petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.

- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.
 - h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
 - i. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah lainnya serta PBB.
 - j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB.
- 4) Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta sebagai berikut:
- a) Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.
Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah Surakarta.
 - b) Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.
 - 1) Peningkatan kapasitas administrasi perpajakan daerah.
 - 2) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.

- 3) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan prima.
- 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional.

2. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Surakarta

Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah untuk:

- a. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
- b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan.
- c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan.
- d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Surakarta adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

2) Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Sub bagian tata usaha terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pangandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

b) Sub Bagian Kepegawaian

Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Sub Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

3) Sub Dinas Bina Program

Sub dinas bina program mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, melaksanakan monitoring, pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan serta melaksanakan evaluasi dan

melaporkan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

Sub dinas bina program, terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan

Seksi perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data untuk mengembangkan kegiatan dinas, melaksanakan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja serta melaksanakan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah.

b) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas

4) Sub Dinas Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi

Sub dinas pendaftaran pendataan dan dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data.

Sub dinas pendaftaran pendataan dan dokumentasi, terdiri dari:

a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

b) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data

Seksi dokumentasi dan pengolahan data mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data wajib pajak serta menyiapkan data potensi pajak dan retribusi.

5) Sub Dinas Penetapan

Sub dinas penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi, menghitung jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Sub dinas penetapan terdiri dari :

a) Seksi Perhitungan

Seksi perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi penerbitan surat ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan surat ketetapan pajak lainnya.

c) Seksi Angsuran

Seksi angsuran mempunyai tugas mengolah dan menetapkan besarnya angsuran pajak dan retribusi.

6) Sub Dinas Pembukuan

Sub dinas pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan penerimaan dan pembukuan persediaan.

Sub dinas pembukuan terdiri dari:

a) Seksi Pembukuan Penerimaan

Seksi pembukuan penerimaan mempunyai tugas mencatat penerimaan, pembayaran setoran pajak dan retribusi.

b) Seksi Pembukuan Persediaan

Seksi pembukuan persediaan mempunyai tugas mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda berharga.

7) Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi serta melayani keberatan dan permohonan banding, serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain.

Sub dinas penagihan terdiri dari:

a) Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan tunggakan pajak, menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan serta melayani permohonan keberatan dan banding.

b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

8) Cabang Dinas

Cabang dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kepala dinas kepada cabang dinas di kecamatan.

Cabang dinas terdiri dari:

- a) Cabang DPPKA I meliputi kecamatan Banjarsari
- b) Cabang DPPKA II meliputi kecamatan Jebres dan kecamatan Pasar Kliwon
- c) Cabang DPPKA III meliputi kecamatan Serengan dan kecamatan Laweyan.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional juga diperlukan dalam kinerja pada DPPKA karena merupakan pelengkap bagi kebutuhan dinas pemerintah daerah kota Surakarta. Kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas terdiri dari : pranata komputer, arsiparis, pustakawan, auditor, dan pemeriksa pajak. Uraian tugas kelompok jabatan fungsional mengikuti pedoman uraian tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki tekad untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa dan negara maju lainnya. Pembangunan nasional adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah yakni serangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional yang ingin dicapai adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, maju, sejahtera yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kesadaran hukum, disiplin, menguasai IPTEK, mandiri, dan beriman serta bertaqwa. Sebagai warga negara peran serta dalam pembangunan sangat diperlukan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan hukum.

Keberhasilan suatu pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan potensi lainnya yang terdapat di daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah pusat memperhatikan pelaksanaan pembangunan di daerah dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini pemerintah telah memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi khususnya di sektor pajak. Pajak merupakan salah satu elemen yang penting dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan Negara yang berguna bagi kelangsungan pemerintahan. Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam manajemen perpajakan mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah mencakup:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu pos pajak daerah adalah pos pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial di Surakarta sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah secara keseluruhan realisasinya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan pendapatan dari masing-masing pos khususnya dari pajak reklame. Berdasarkan pencapaian target realisasi anggaran pajak reklame, penulis ingin menghitung besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surakarta dengan berbagai hambatan dan upaya untuk meningkatkannya tahun anggaran 2006-2008. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006-2008”**.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa efektif target anggaran dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006-2008?

2. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006-2008?
3. Hambatan apa saja yang ditemui DPPKA Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?
4. Upaya apa saja yang dilakukan DPPKA Surakarta dalam usaha peningkatan kontribusi pajak reklame?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang di atas adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas target anggaran dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006-2008.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006-2008.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui DPPKA Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DPPKA Surakarta dalam usaha peningkatan kontribusi pajak reklame.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kotamadya Surakarta.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dalam penerapan ilmu perpajakan yang telah didapat kedalam kenyataan sesungguhnya khususnya tentang pajak reklame.

3. Bagi Pihak lain

Penulis berharap karya ini dapat dijadikan referensi serta sumber informasi bagi peneliti selanjutnya serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam membuat laporan studi lapangan ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik berikut ini:

1. Teknik Observasi

Yaitu teknik Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap sesuatu yang diteliti dan melakukan pencatatan tentang apa yang telah diamati.

2. Teknik Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang ada pada perusahaan tersebut.

3. Teknik Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta keterangan secara langsung dengan pihak terkait yaitu staf kantor untuk memperoleh informasi secara jelas dan detail.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sumber dengan buku literature yang ada hubungannya dengan obyek KKL.

Adapun data yang diperoleh yaitu:

1. Data Primer

Suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan penelitian maupun wawancara dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder

Suatu data yang diperoleh tidak secara langsung tetapi melalui orang lain dengan mengumpulkan, kemudian dilaporkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pajak Secara Umum

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta

ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

a. Peran Pajak dalam Pembangunan

Keterkaitan dan peranan pajak terhadap pembangunan nasional menjadi lebih nyata melalui pembayaran pajak yang benar oleh seluruh wajib pajak. Hanya melalui sumber pembiayaan dari pajak maka negara dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Basarnya peranan pajak kiranya dapat memberikan kesadaran kepada setiap wajib pajak untuk membayar pajak dan menjadi satu kebanggaan tersendiri karena telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

b. Fungsi Pajak

Menurut Wirawan dan Burton dalam bukunya “Hukum Pajak” (2007:10) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi *Regulerend* adalah pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya dibidang keuangan.
- 3) Fungsi Demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

- 4) Fungsi Redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

c. Penggolongan Jenis Pajak

- 1) Menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- 2) Menurut sasarannya atau obyeknya dapat dibagi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya dapat dibagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

3) *With Holding system*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/ Kota) yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. (Kesit Bambang Prakosa, 2003: 1-2)

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi berikut ini:

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel.
 - 2) Pajak Restoran.
 - 3) Pajak Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame.
 - 5) Pajak Penerangan Jalan.
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - 7) Pajak Parkir.

Dengan adanya peraturan daerah, maka dapat ditetapkan jenis Pajak Daerah selain tersebut di atas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.

- b. Terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - c. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 - d. Bukan merupakan obyek pajak propinsi atau pusat.
 - e. Potensi yang ada memadai.
 - f. Tidak memberikan dampak negative.
 - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
 - h. Menjaga kelestarian lingkungan.
- a) Kriteria pajak daerah (Kesit, 2003:2) secara spesifik diuraikan oleh K. J. Davey (1988) "*Financing Regional Government*" yang terdiri dari 4 hal:
- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah.
 - 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - 3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.
 - 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.
- b) Kriteria Efektivitas Pajak Daerah
- 1) Kecukupan Elastisitas
- Sumber tersebut harus mneghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya yang akan dikeluarkan. Elastisitas diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

2) Keadilan

Pajak sebagai alat redistribusi pendapatan.

3) Kemampuan Administratif

Adanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak.

4) Kesepakatan Politis

Mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, siapa yang dibayar dan membayarnya dan bagaimana ditetapkan, cara memungutnya, dan sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran dibidang perpajakan.

3. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan pengertian reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dari atau corak atau ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Dasar hukum pajak reklame yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

a. Subyek Pajak Reklame

- 1) Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- 2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak reklame adalah:
 - a) Untuk perorangan adalah yang menyelenggarakan reklame.
 - b) Untuk badan adalah pengurus atau penguasanya.

b. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara pajak reklame.

Jenis/obyek reklame adalah sebagai berikut:

1) Reklame Papan (*Billboard*)

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

2) Reklame Kain

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

3) Reklame Melekat (*Sticker*)

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk

ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m² per lembar.

4) Reklame Selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

5) Reklame Berjalan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki.

6) Reklame Kendaraan

Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada angka 4 dan 5 di atas.

7) Reklame Peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

8) Reklame Udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

9) Reklame Suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

10) Reklame Film/*Slide*

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Reklame yang dibuat atau diadakan oleh pemerintah.
- 2) Reklame yang menurut pertimbangan dibuat untuk maksud amal dan untuk kepentingan umum untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Reklame yang diselenggarakan partai atau golongan politik sesuai dengan fungsinya.

c. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- 2) Nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan NJOP reklame.
- 3) Tarif dasar nilai strategis ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 03/Drt/1999 tanggal 27 Desember 1999.

- 4) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% dari nilai sewa reklame.

d. Tata Cara Pengajuan Permohonan Ijin Reklame

- 1) Ijin memasang reklame diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis di atas formulir yang telah disediakan Dipenda Surakarta, yang berisi uraian sebagai berikut:
 - a) Nama dan alamat pemohon.
 - b) Jenis, bahan, dan perlengkapan reklame.
 - c) Ukuran reklame dan ketinggian reklame.
 - d) Bunyi, isi, naskah gambar atau foto reklame.
 - e) Tempat pemasangan reklame.
 - f) Posisi reklame yang dipasang.
 - g) Surat kuasa dari perusahaan apabila pemohon reklame diserahkan pada pihak lain.
 - h) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- 2) Untuk memasang reklame di atas tanah dan gedung atau bangunan milik dan atau dikuasai pemerintah atau BUMN atau BUMD harus dilampirkan surat persetujuan dari pemilik yang bersangkutan.
- 3) Untuk memasang reklame di atas tanah atau gedung atau bangunan milik swasta atau badan perorangan harus dilampirkan surat persetujuan dari pemilik yang bersangkutan.
- 4) Atas surat permohonan ijin bagi reklame jenis billboard, papan atau yang sejenis yang dibuat dengan bahan dan perlengkapan

apapun juga yang didirikan di atas tanah atau gedung atau bangunan disertakan pula gambar konstruksi reklame yang bersangkutan.

- 5) Surat permohonan ijin beserta berkas-berkas diserahkan atau dikirim kepada petugas DPPKA atau melalui unit pelayanan terpadu.

e. Cara Penghitungan Besarnya Pajak Reklame

- 1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% dari nilai sewa.
- 2) Rumus penghitungan besarnya pajak reklame:

$$\text{Tarif} \times \text{Nilai sewa}$$

- 3) Kasus untuk reklame non board (*balliho, banner, sunner, dsb*) diperhitungkan dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) reklame tanpa dengan mempertimbangan nilai strategis.
- 4) Perhitungan NJOP reklame berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggara reklame meliputi:
 - a) Biaya pemasangan.
 - b) Biaya pemeliharaan.
 - c) Lama pemasangan.
 - d) Jenis reklame.
- 5) Perhitungan nilai strategis berdasar besar bobot dan skor dari nilai strategis reklame adalah sebagai berikut:
 - a) Lokasi.
 - b) Sudut pandang.

c) Ketinggian.

d) Luas reklame.

f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame

Tata cara penghitungan dan penetapan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila SKPD tidak dibayar atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- b) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan:
- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. SKPDKBT diterbitkan bila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan bertambahnya jumlah

pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Tetapi aturan ini tidak berlaku apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

g. Pelaksanaan Pajak Reklame

- a) Pemasangan reklame baru boleh dilakukan setelah mendapat ijin reklame dan pajak retribusinya dibayar penuh.
- b) Diberi tanda lunas reklame yang dipasang di tempat reklame yang bersangkutan atau tempat lain yang mudah untuk diadakan pemeriksaan.
- c) Bentuk, ukuran, cara pemasangan tanda lunas pajak reklame diatur oleh Kepala DPPKA.

B. Pembahasan

1. Analisis Efektifitas Target Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dengan membandingkan target anggaran terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU. No. 34 tahun 2000 tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan target anggaran adalah jumlah total penerimaan pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, sedangkan realisasi penerimaan adalah jumlah total penerimaan yang dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk menghitung efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Besarnya efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target anggaran 2006-2008 seperti terlihat di bawah ini:

Tabel II. 1
Ratio Target Anggaran dan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006-2008

Tahun Anggaran	Target Anggaran	Realisasi PAD	Efektivitas (%)
2006	74.709.440.000	78.585.751.288	105.18
2007	88.034.379.000	89.430.977.982	101.59
2008	96.199.901.000	102.989.919.369	107.05

Sumber DPPKA

Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa target anggaran pada tahun 2006 sebesar Rp. 74.709.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

66.052.438.987,00 dengan tingkat efektivitasnya sebesar 105.18%, pada tahun 2007 dari target anggaran Rp. 88.034.379.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 89.430.977.982,00 dan tingkat efektivitasnya sebesar 101.59%, dan pada tahun 2008 dari target anggaran Rp. 96.199.901.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 102.989.919.369,00 dan tingkat efektivitasnya sebesar 107.05%.

Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2006-2007 efektivitas mengalami penurunan sebesar 3.59%. Hal ini dikarenakan penurunan pada pemasangan iklan. Sedangkan pada tahun anggaran 2008 efektivitasnya mengalami kenaikan sebesar 5.46% yang disebabkan oleh adanya kenaikan pemasangan iklan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi atau naik turun, hal ini disebabkan karena pasang surutnya pemasangan iklan.

2. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari berbagai sumber pendapatan, dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD 2006-2008 seperti terlihat di bawah ini:

Tabel II. 2
Ratio Kontribusi dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2006-2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Ratio Kontribusi(%)
2006	3.579.599.930	78.585.751.288	4.55
2007	3.441.757.063	89.430.977.982	3.84
2008	3.527.909.910	102.989.919.369	3.42

Sumber DPPKA

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ratio penerimaan pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

Pada tahun 2006 realisasi pajak reklame sebesar Rp. 3.579.599.930,00 sedangkan realisasi PAD Rp. 78.585.751.288,00 maka diperoleh ratio efektivitas sebesar 4.55%. Pada tahun 2007 realisasi pajak reklame sebesar Rp. 3.441.757.063,00 sedangkan realisasi PAD Rp. 89.430.977.982,00 maka diperoleh ratio efektivitas sebesar 3.84%. Tahun 2008 realisasi pajak reklame sebesar Rp. 3.527.909.910,00 sedangkan realisasi PAD Rp. 102.989.919.369,00 maka diperoleh ratio efektivitas sebesar 3.42%.

Dapat disimpulkan bahwa ratio penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dari tahun 2006-2008 mengalami penurunan sebesar 1.13%.

Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kontribusi realisasi tiap-tiap periode tersebut yang mungkin dikarenakan berkurangnya potensi di Jl. Slamet Riyadi sebelah selatan jalan akibat adanya kebijakan Pemerintah Kota yang mengharuskan pengurangan titik-titik strategis yang harus tetap memperhatikan syarat estetika, kekuatan konstruksi, dan tidak mengganggu pemandangan serta menunjukkan keindahan kota.

3. Hambatan yang Ditemui DPPKA Surakarta dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Ada beberapa hambatan yang ditemui oleh DPPKA Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Hambatan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Hambatan dari Luar

- 1) Ada titik-titik lokasi yang dianggap strategis namun ternyata hasilnya kurang memuaskan yang disebabkan karena banyaknya pepohonan yang menutup lokasi pemasangan reklame. Seperti di Jalan Menteri Supeno dan Jalan Mr. Moh Yamin.
- 2) Adanya Wajib Pajak yang membandel dalam hal pemasangan reklame tanpa melalui prosedur yang berlaku. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak merasa bahwa prosedur/mekanisme perijinan untuk pemasangan reklame dinilai terlalu rumit, sehingga mereka enggan mengurus perijinan tersebut.

- 3) Adanya pemasangan reklame liar. Disebut reklame liar dikarenakan reklame tersebut tidak mengantongi ijin dari Walikota Surakarta sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame.
- 4) Kurangnya kesadaran pemasang reklame sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak reklame. Misalnya pemasangan reklame melalui selebaran, sering ditemukan selebaran yang tidak diporporasi dahulu sebelum disebar. Porporasi adalah melubangi selebaran sebagai tanda selebaran tersebut sudah dibayar lunas pajaknya dan siap disebar.

b. Hambatan dari Dalam

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembongkaran reklame yang sudah kadaluarsa. Sarana dan prasarana tersebut meliputi mobil lapangan, truk, tangga, dan helmet sebagai pengaman.
- 2) Adanya pelimpahan kewajiban untuk membayar pajak reklame antara pengusaha dengan biro iklan yang tidak diketahui secara jelas statusnya. Hal ini menyebabkan perselisihan tentang siapa yang seharusnya membayar pajak, apakah biro jasa ataukah pengusaha yang ingin memasang iklan itu sendiri.
- 3) Kurangnya tenaga lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pajak reklame. Tenaga lapangan yang bertugas mengawasi, memantau, dan menertibkan reklame sekarang masih sedikit dan tidak

sebanding dengan banyaknya reklame yang terpasang di Kota Surakarta.

4. Upaya yang Dilakukan oleh DPPKA Surakarta dalam Usaha Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh DPPKA Surakarta untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

Upaya tersebut dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Upaya dari Luar

- 1) Melakukan kerjasama antara DPPKA dan pengusaha berupa pemberian hak pengelolaan titik reklame untuk jangka waktu tertentu dengan cara menyewakan lokasi strategis untuk pemasangan reklame dengan sistem pelelangan terbuka. Sistem pelelangan terbuka biasanya dibuka di tempat strategis, disini peran biro iklan sangat membantu dalam pelelangan terbuka ini.
- 2) Pihak DPPKA menghubungi Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota Surakarta melalui surat dan telepon. Cara ini dirasa cukup efektif, karena dengan adanya terobosan seperti itu pihak Dipenda dapat mengetahui dengan cepat apakah Wajib Pajak tersebut memperpanjang masa pemasangan reklame atau tidak, sehingga DPPKA dapat segera melakukan tindakan yang diinginkan oleh Wajib Pajak tersebut.

- 3) Dalam hal ijin pemasangan reklame, masa kadaluarsa segera dimintakan perpanjangan ijin oleh pemilik. Jika sampai masa, DPPKA akan mengambil tindakan untuk mencabut ijin dan melakukan pembongkaran terhadap reklame yang dipasang.
- 4) Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak reklame agar lebih paham dan mengerti tentang prosedur dan mekanisme perijinan serta pembayaran pajak reklame.
- 5) Melakukan pembongkaran reklame liar yang tidak mendapatkan ijin pemasangan dari DPPKA.
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal Wajib Pajak yang membandel. Memberikan sanksi yang tegas serta denda kepada Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar reklame.

b. Upaya dari Dalam

- 1) Dipenda berusaha mendatangkan peralatan yang lengkap untuk melakukan pembongkaran reklame yang sudah kadaluarsa. Peralatan untuk melakukan pembongkaran tersebut antara lain mobil lapangan dan tangga.
- 2) Mengusahakan kerjasama yang baik antara DPPKA, pengusaha, dan biro iklan agar pemasangan reklame berjalan dengan baik dan tidak menemui hambatan. Kerjasama tersebut perlu digalakkan, karena antara DPPKA, pengusaha, dan biro iklan saling membutuhkan. Biasanya DPPKA menghubungi biro iklan bila ada

lokasi strategis yang akan dilelang, selanjutnya biro iklan menghubungi pengusaha.

- 3) Dibentuk tim khusus/Tim Penataan Reklame oleh DPPKA untuk mengawasi, memantau, menertibkan penempatan reklame yang terdiri dari DKP, DLLAJ, dan DPU.

BAB III

TEMUAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Evaluasi Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006-2008, maka penulis menemukan kebaikan dan kelemahan.

A. KEBAIKAN

Adanya pengawasan yang lebih baik dari pihak petugas pemasang atau penata reklame mengenai pelaksanaan pajak reklame terhadap subyek dan obyek pajak reklame. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pajak reklame terhadap subyek dan obyek pajak reklame yaitu:

1. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar lebih paham dan mengerti tentang prosedur dan mekanisme perijinan serta pembayaran pajak reklame.
2. Melakukan pembongkaran reklame liar yang tidak mendapatkan ijin pemasangan dari DPPKA maupun reklame yang sudah kadaluarsa.

B. KELEMAHAN

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penertiban dan monitoring reklame. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mobil lapangan, truk, tangga, helmet, serta minimnya tenaga lapangan dalam penertiban reklame.

2. Adanya titik lokasi tertentu yang sebenarnya dianggap strategis namun kurang dioptimalkan pemanfaatannya, seperti di Jalan Menteri Supeno Manahan yang *notabene* selalu ramai tetapi reklame yang terpasang di jalan tersebut tidak terlalu banyak
3. Adanya perijinan pajak reklame yang sudah kadaluarsa tetapi masih dipasang. Disini Pemerintah Daerah memberi batas waktu 15 hari kepada pemilik reklame untuk melakukan pembongkaran setelah habis masa berlakunya ijin pemasangan reklame. Apabila setelah batas waktu tersebut tidak digunakan oleh pemilik reklame maka pembongkaran akan dilakukan oleh petugas lapangan.
4. Kurangnya kesadaran pemasang reklame sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak reklame. Misalnya pemasangan reklame melalui selebaran, sering ditemukan selebaran yang tidak diporporasi dahulu sebelum disebar. Porporasi adalah melubangi selebaran sebagai tanda selebaran tersebut sudah dibayar lunas pajaknya dan siap disebar.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2006 sampai tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 3.59% yang disebabkan adanya penurunan pada pemasangan iklan. Sedangkan pada tahun 2008 efektivitasnya mengalami kenaikan sebesar 5.46%, hal ini disebabkan adanya kenaikan pemasangan iklan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi atau naik turun yang disebabkan oleh pasang surutnya pemasangan iklan.
2. Ratio kontribusi pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 1,13%. Penurunan tersebut dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam penertiban dan monitoring reklame. Selain itu titik lokasi tertentu yang sebenarnya strategis namun kurang dioptimalkan pemanfaatannya.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame diketahui ada beberapa hambatan, hambatan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu hambatan dari luar dan hambatan dari dalam. Hambatan dari luar disebabkan oleh pengusaha pemasang reklame atau Wajib Pajak yang bersangkutan, sedangkan hambatan dari dalam disebabkan oleh sarana dan prasarana yang ada di DPPKA dalam hal pembongkaran reklame.

4. Adanya Upaya yang sudah cukup baik yang dilakukan oleh DPPKA, antara lain pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengatasi hambatan yang ada.

B. SARAN

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana bagi petugas agar para petugas dapat bekerja dengan baik.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan titik lokasi yang dianggap strategis.
3. Melakukan pembongkaran secara bertahap apabila ada reklame yang melebihi batas waktu pemasangan.
4. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak reklame agar lebih paham dan mengerti tentang prosedur dan mekanisme perijinan serta pembayaran pajak reklame yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, N. Robert, John Dearden dan Norton Bedford. 1989. *Management Control System*. Jakarta: Erlangga
- Illyas, B. Wirawan dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Illyas, B. Wirawan dan Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Munawir. 1982. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Prakoso, Bambang kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi III*. Jakarta: Salemba Empat
- Sri, S. Valentina dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Suandy, Early. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : FENDI WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa : F 3406031
Fakultas : Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jurusan/ Program Studi : AKUNTANSI PERPAJAKAN DIPLOMA III
Tempat/ Tanggal Lahir : SUKOHARJO, 22 NOPEMBER 1986
Alamat Rumah : Candi RT03/XI, Cemani, Grogol,
SUKOHARJO
Judul Tugas Akhir : EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006-2008
Pembimbing Tugas Akhir : Drs. Juka Winarna, MSi., AK

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan/ salinan/ saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa:
 - a. Sebelum dinyatakan LULUS
 - * Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan LULUS
 - * Pencabutan gelar dan penarikan Ijasah keserjanaan yang telah diperoleh

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 10 Agustus 2009

Yang Menyatakan



Fendi Wibowo



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jln. Jendral Sudirman No. 2 Telp. 642020 (408), 648089, 638893, Fax (0271) 644631, 642038 Surakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/ 350/ 2009

Berdasarkan surat Ketua Program Studi D-3 Perpajakan
Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 439/H27.1.12/PL14.01/2005
tanggal 19 Desember 2008 tentang permohonan untuk magang kerja bagi :

Nama : FENDI WIBOWO
N I M : F3406031
Jurusan : D-3 Perpajakan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menerangkan
bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan magang kerja pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta pada tanggal 2
Maret – 31 Maret 2009.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, agar yang
berkepentingan maklum dan guna seperlunya.

Surakarta, April 2009

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA SURAKARATA
SEKRETARIS


Drs. TRIYANA, MM p
Pembina
NIP. 19581224 199310 1 001

HW 2 due 12
- Dec 5, 2005

lxiv

Abstract

14-00000



Pemerintah Kota Surabaja
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Periode 1 Desember 2017 Periode 2017

KODE REVENUE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEMBAGA / (ORGANISASI)
			PERIODE 1	PERIODE 2	TOTAL	
4	PENDAPATAN	713.622.637.000,00	660.492.452.667,00	26.907.774.729.349,00	731.362.156.397,00	21.641.714.372,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.179.021.000,00	57.515.128.204,00	77.131.474.791.073,00	102.999.919.309,00	6.796.011.369,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	45.761.000.000,00	39.971.921.023,00	60.488.700.159,00	46.655.622.021,00	1.076.622.021,00
4.1.1.1	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	4.353.941.750,00	60.413.679,00	5.213.716.162,00	13.556.162,00
4.1.1.1.01	Pajak Hotel Impor	2.420.934.600,00	2.420.934.600,00	301.126.615,00	2.722.069.215,00	(108.981.386,00)
4.1.1.1.01.03	Pajak Hotel Tiga	404.482.000,00	566.315.654,00	116.276.604,00	684.581.259,00	280.094.750,00
4.1.1.1.01.04	Pajak Hotel Dua	423.250.000,00	355.572.692,00	61.015.720,00	416.588.412,00	(7.161.588,00)
4.1.1.1.01.05	Pajak Hotel Satu	334.429.000,00	246.564.606,00	42.504.463,00	291.072.074,00	(47.319.414,00)
4.1.1.1.01.06	Pajak Hotel Tiga	498.374.000,00	383.099.672,00	39.877.915,00	422.955.587,00	(47.319.414,00)
4.1.1.1.01.07	Pajak Hotel Dua	414.623.000,00	426.161.102,00	41.289.512,00	467.445.612,00	30.579.647,00
4.1.1.1.01.08	Pajak Hotel Satu	181.623.000,00	128.265.182,00	13.995.796,00	142.260.978,00	(39.368.025,00)
4.1.1.1.01.09	Pajak Hotel Dua	48.064.000,00	44.269.876,00	3.349.750,00	47.619.626,00	(1.000.400,00)
4.1.1.1.01.12	Pajak Hotel Tiga	1.500.000.000,00	1.808.840.912,00	608.000.000,00	2.416.840.912,00	142.041.366,00
4.1.1.1.02	Pajak Hotel	5.603.830.000,00	4.878.540.890,00	615.672.411,00	5.494.210.000,00	(116.430.000,00)
4.1.1.1.02.01	Pajak Hotel	1.791.155.000,00	1.877.506.893,00	218.538.471,00	2.096.040.374,00	301.528.374,00
4.1.1.1.02.02	Pajak Hotel	179.067.000,00	52.796.504,00	3.120.510,00	55.917.014,00	(56.416.482,00)
4.1.1.1.02.03	Pajak Hotel	4.723.098.000,00	3.800.915.591,00	612.437.466,00	4.413.372.657,00	62.372.657,00
4.1.1.1.03	Pajak Hotel	798.311.000,00	703.279.600,00	245.359.506,00	948.639.106,00	206.342.510,00
4.1.1.1.03.01	Pajak Hotel	150.591.000,00	203.274.071,00	34.662.252,00	237.936.323,00	142.150.071,00
4.1.1.1.03.02	Pajak Hotel	163.913.000,00	175.264.621,00	17.761.620,00	193.026.241,00	29.123.621,00
4.1.1.1.03.03	Pajak Hotel	1.565.915.000,00	1.259.871.509,00	712.435.656,00	1.972.307.165,00	(63.600.539,00)
4.1.1.1.03.04	Pajak Hotel	62.317.000,00	46.994.410,00	3.245.164,00	50.239.574,00	(11.576.426,00)
4.1.1.1.03.05	Pajak Hotel	27.693.000,00	78.430.103,00	8.099.095,00	86.500.297,00	8.611.297,00
4.1.1.1.03.06	Pajak Hotel	202.709.000,00	232.665.662,00	20.193.002,00	252.858.664,00	50.157.662,00
4.1.1.1.03.07	Pajak Hotel	218.081.000,00	211.103.678,00	17.818.452,00	228.922.130,00	3.542.130,00
4.1.1.1.03.08	Pajak Hotel	937.271.000,00	689.271.000,00	170.761.015,00	859.032.015,00	57.446.042,00
4.1.1.1.03.09	Pajak Hotel	7.237.200,00	6.307.310,00	285.470,00	6.592.780,00	(1.302.200,00)
4.1.1.1.03.12	Pajak Hotel	758.441.000,00	127.411.210,00	41.416.000,00	168.827.210,00	(371.614.790,00)
4.1.1.1.04	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.04.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.04.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.04.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.04.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.05	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.05.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.05.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.05.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.05.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.06	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.06.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.06.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.06.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.06.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.07	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.07.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.07.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.07.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.07.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.08	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.08.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.08.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.08.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.08.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.09	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.09.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.09.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.09.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.09.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.10	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.10.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.10.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.10.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.10.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.11	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.11.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.11.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.11.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.11.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.12	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.12.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.12.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.12.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.12.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.13	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.13.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.13.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.13.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.13.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.14	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.14.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.14.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.14.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.14.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.15	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.15.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.15.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.15.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.15.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.16	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.16.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.16.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.16.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.16.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.260.000,00	20.229.040,00	6.296.040,00
4.1.1.1.17	Pajak Hotel	3.420.000.000,00	3.235.672.782,00	331.157.126,00	3.566.829.908,00	77.209.908,00
4.1.1.1.17.01	Pajak Hotel	2.501.545.000,00	2.459.115.254,00	60.205.238,00	2.519.320.492,00	59.896.112,00
4.1.1.1.17.02	Pajak Hotel	637.862.000,00	492.267.210,00	42.191.701,00	534.458.911,00	176.146.650,00
4.1.1.1.17.03	Pajak Hotel	216.593.000,00	223.166.310,00	78.716.701,00	301.883.011,00	20.469.100,00
4.1.1.1.17.04	Pajak Hotel	18.500.000,00	18.969.040,00	1.26		

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NUMBER : 19. TITLE : 1999 SERI : A NUMBER :

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S E R A N G K A T A
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A B A Y A

NUMBER 3 FALL 1993

TESTING

PAJAK REKLAME-

DENGAN BUDHAT TUBAH YANG MAHA ESA

WALIKOTABADYA KEPALA DAERAH TENGGAT II SURABAYA

Meinberg : 1. bahwa sejak kelahiran merupakan salah satu pendidikan
dunia yang cukup penting sebagai sumber pengetahuan
untuk membangun pengetahuan Perencanaan dan Per-
baikan Dunia.

- Meringkat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Baru Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelenggara Negeri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Kewajiban Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengalihan Pajak dengan Surat Pinjam (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Cara Pengawasan Pajak Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Peraturan Pengawasan Persewaan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rasio Daerah;

217

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyampaikan Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayarannya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pembayaran di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sorkam Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sorkam;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sorkam,

M E M U T U S K A N

Menerapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK MELAJE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

- Daerah Persewaan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Sorkam;
 - b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Sorkam;
 - c. Walikota Kotamadya Kepala Daerah adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sorkam;
 - d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas secara dibidang perpajakan daerah untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan;
 - e. Pajak adalah yang selanjutnya disebut pajak adalah suatu wajib yang dikenakan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang atas penggunaan pelayanan;
 - f. Relikue adalah benda, ahli, pelayanan atau modal yang memiliki bentuk material dan secara ragunnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

218

menyerahkan, mengajukan dan menuliskan nota barang, jasa atau barang, sebagai bukti pemenuhan kewajiban pajak, yang telah terutang dan tidak ada kredit pajak;

g. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

h. Nilai utang pajak adalah jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang terutang dan tidak ada kredit pajak;

i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

j. Surat Sisa Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

k. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

l. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

m. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

n. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

o. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

p. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

q. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

r. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

s. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

o. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

p. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

q. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

r. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

s. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

t. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

u. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

v. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

w. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

x. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

y. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

z. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

aa. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

ab. Surat Keterangan Pajak Daerah adalah surat yang menunjukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh pejabat pajak;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 1

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

(1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1a, meliputi:

- reklame papan / billboard, megaphone;
- reklame lain;
- reklame reklame (other);
- reklame reklame;
- reklame reklame, termasuk pada reklame;
- reklame reklame;
- reklame reklame;
- reklame reklame;
- reklame reklame;
- reklame reklame;

(1) Denah, skema, korografi, pemetaan dan lain sebagainya Reklame diumumkan dan dipajang oleh Walikota/Kepala Daerah.

Pasal 4

Dibebaskan dari objek Pajak adalah penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, surat kabar, media lainnya dan yang sejenisnya.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menerima Reklame.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung dengan memperhatikan Nilai Sewa dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

(3) Tarif dasar nilai sewa sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Sewa Reklame.

Pasal 8

Besarnya pajak utang dibayar dengan cara, mengupayakan Tarif Pajak reklame yang dimaksud dalam Pasal 7 Penetapan Daerah ini dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Penetapan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN, ALAKA PAJAK, PAJAK TERUTANG
DAN CARA PEMERINTAHAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan reklame sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pasal 11

Pajak terutang terutang pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan STPD.

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dimusyawarahkan dengan Wajib Pajak dan Kantor Pajak dan diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

(3) Bentuk, isi dan lain-lainnya STPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Kepala Daerah.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENTAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Penetapan Daerah ini, Walikota/Kepala Daerah menetapkan STPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ada kurang dibayar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah SKPD diterima, diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setahun dan denda dengan eseserikan STPD.

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemutihan Daerah ini dipaparkan untuk meringkas, memperhalus dan memaparkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, Walikota/kepala Daerah dapat memberikan:

- a. SKPKKB,
- b. SKPKCB,
- c. SKPKCN.

- (3) SKPKCN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diberikan:

- a. apabila berdasarkan hasil pemutihan atau terutang lain pajak yang terutang tidak ada yang dibayar, diberikan untuk administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tahun dihitung dari pajak yang terutang atau terutang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. apabila SPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan tidak dapat secara tertulis, diberikan untuk administrasi sebesar 2% (dua persen) setelah dihitung dari pajak yang terutang atau terutang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. apabila kewajiban mengisi SPTD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan diberikan untuk administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang terutang atau terutang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPKCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diberikan apabila diberikan dari awal dan saat yang terutang belum terungkap yang menyebabkan penalti atau jumlah pajak yang terutang dan diberikan untuk administrasi berupa terutang sebesar 100% (terima perseratus) dari jumlah terutang pajak tersebut.

- (5) SKPKCN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diberikan apabila jumlah pajak terutang secara besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (1) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKCB dan SKPKD KUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak ada, tidak sebagaimana dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dihitung dengan memberikan SPTD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setahun.

- (2) Penentuan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak diberikan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum diberikan tindakan pemutihan.

DALAM VI

TATA CARA PEMUTIHAN

Paral 15

- (1) Pemutihan pajak dilakukan di Kantor Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/kepala Daerah setelah melalui prosedur yang ditentukan dalam SPTD, SKPD, SKPKCB, SKPKCB dan SPTD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/kepala Daerah, hasil pemutihan pajak harus diberikan ke Kantor Daerah setelah melalui prosedur yang ditentukan.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SPTD.

Paral 16

- (1) Pemutihan pajak harus dilakukan selang satu tahun.

- (2) Walikota/kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang dalam bentuk lain, setelah melalui persetujuan yang ditentukan.

- (3) Anggapan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dengan diberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setelah dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4) Walikota/kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk memenda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah melalui persetujuan yang ditentukan dengan diberikan

kan berupa sebesar 2% (dua persen) sebesar dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar.

- (3) Persetujuan untuk dapat mengangap dan memaafkan pembayaran serta atau
atau pembayaran sebagian dan penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali-
konnadnya Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Penunda-
an Daerah ini diberikan untuk bukti pembayaran dan dapat dikur
perhitungan

- (2) Benda, jasa, ini, karena tidak bukti pembayaran dan bukti penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan
Surat Keputusan Wakilnannadnya Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jumlah tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu selanjutnya 7 (tujuh) hari setelah diterima-
nya Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi
jumlah pajak tersebut.

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini diberikan diterbitkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dianggap melanggar dengan Surat Paksa apabila:

- a. tidak melunasi tunggak pajak sampai dengan tanggal jumlah tempo pem-
bayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat
Peringatan;

- b. selanjutnya tidak dilaksanakan pembayaran setelah dan setelah; dan

220

- c. tidak memaafkan ketidaksiwaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Pemerintahan Angnana atau Penundaan Pembayaran Pajak.

- (2) Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat setiap minggu setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan dalam jangka waktu 2 x 24 jam
setelah tanggal penertinaan Surat Paksa, Pejabat langsung menetapkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyelesaian.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan oleh Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajak-
nya, selanjutnya selanjutnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat Perintah Melaksanakan Penyelesaian, Pejabat mengupayakan pemertinaan Pe-
nataan Tanggal Pelaksanaan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
an lelang, Juru Sita Pajak segera memberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Pajak.

Pasal 23

Benda, jasa, dan lain formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagih-
an Pajak Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wakilnannadnya Kepala
Daerah.

BAB VIII

PENGURANGAN, KEBENCUKAN DAN PEMERIDASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wakilnannadnya Kepala Daerah berkeputusan memberikan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan pajak
yang diberikan untuk kepentingan komersial yang bersifat umum.

221

202

22

Page 19

Apabila pengujian diketahui sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, maka hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan bagi pelaksanaan anggaran yang akan datang. Hal ini akan dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Hal ini akan dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Hal ini akan dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

IX 878

CONCENTRATION KELEPTIHAN PEMBAYARAN RAJAK

北

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak Daerah secara tertulis dan secara langsung ke kantor pajak yang bersangkutan;

- a. Nona dan suami Wajih Pajak;
 - b. Nona Pajak;
 - c. Aturan pelaksanaan pembayaran pajak;
 - d. Aturan yang lain.
- 2) Wajihannya Pajak. Dengan alasan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak kontinyuas pemenuhan persyaratan pelaksanaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pajak ini harus memuat ketentuan:
- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pajak ini diperpanjang Wajihannya Pajak. Dengan alasan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak kontinyuas pemenuhan persyaratan pelaksanaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pajak ini harus memuat ketentuan:
 - (a) Wajih Pajak mempunyai utang pajak lainnya, ketetapan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pajak ini langsung dipotong dan/atau minimal terhitung dalam utang pajak lainnya;
 - (b) Penghapusan ketetapan pembayaran pajak, ketetapan denda dan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKDPKL, dengan menuliskan Suku Perintah Membayar Pajak (SPMPK) yang diterbitkan oleh Wajihannya Karcis Denda.

1000

KEDALIHUJARAN TENAGILAN

Table 51

(1) Hak untuk melakukan pengalihan pajak, berdasarkan sebuah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terasainya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam.

(2) Kedeputi ketua pengisian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 161 bertanggungjawab :

- a. disebarkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
- b. ada pengalangan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

OK 5/10

WENTENTUAN PINDAAN

Parasit. 11

(1) Wajib Pajak yang karena keajaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Diurus atau yang menjadi debitur tidak benar atau tidak lengkap atas selang-seling ketunggahan yang tidak benar sehingga merupakan Kesalahan Diurus dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Pasal 38

Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukakarta.

Diundangkan di Sukakarta
Pada tanggal 12 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SUKAKARTA

Ketua

Cop. Ttd.

RAHARDJO

DISTRIK KANAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No.
Tgl.

Diundangkan di
Pemerintahan Daerah dan Daerah
Daerah Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cop. Ttd.

DR. KAUSAR AS

228

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SUKAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

PAJAK REKLAME

1. PENJELASAN UMUM

Babes Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Selain dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman pelaksanaan dan uraian bagi Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan pajak khususnya reklame. Sehingga Pajak Reklame yang semula ini diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pajak Reklame perlu diadakan penyempurnaan materi.

Sejalan dengan telah diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu masalah berkaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka dalam memantapkan landasan peraturan Undang-Undang terdahulu khususnya yang berkaitan dengan peninjauan dan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Pajak ini juga merujuk kepada jeli dan proses yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 sesuai dasar yang ditetapkan Pasal 125 ayat 2 dan Pasal 123 UU Nomor 22 Tahun 1999.

229

3. PENETAPAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 2 : Cukup jelas.
 Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
 Pasal 3 ayat (3) : 1. Untuk penyelenggaraan rekayasa di kawasan penyelenggaraan rekayasa harus dibuat titik rekayasa, kontrol dan ketinggian, bentuk dan ukuran rekayasa dengan memperhatikan etika dan estetika dan keamanan;
 2. Titik rekayasa apabila penyelenggaraan rekayasa dilaksanakan tidak lebih lokal rekayasa, kontrol dan ketinggian rekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota;
 3. Untuk Penyelenggaraan Rekayasa itu diwajibkan ada penyelenggaraan rekayasa dikawasan dengan sistem atau ayu;
 4. Rekayasa harus untuk area atau sendiri dan preferi dalam maksimal 2 meter per segit yang dipasang di tanah sendiri tanpa menggunakan kontrol tidak diperlukan jika akan lebih penyelenggaraan rekayasa yang berakutansi tetap berakutansi menjadi SP7PD dan memenuhi kewajiban sebagai warga pajak.
 Pasal 4 s.d Pasal 5 : Cukup jelas.
 Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
 Pasal 6 ayat (2) : Nilai manfaat terdiri dari lokasi, nilai jual, luas dan jumlah pemukiman rekayasa, tinggi rekayasa dan nilai pandang. Dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak rekayasa harus melalui penananaan dan dilakukan pada awal peng diayut.
 Pasal 16 ayat (1) : Nilai Jual Objek Pajak Rekayasa yang diwajibkan pasal ke 3 (tiga) terdapat nilai tanah penyelenggaraan rekayasa.

230

- Pasal 7 s.d Pasal 11 : Cukup jelas.
 Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
 Pasal 12 ayat (2) : Penyelenggaraan SP7PD untuk rekayasa insidental 1 (satu) hari, sedangkan untuk rekayasa jangka waktu lebih dari 30 hari selanjutnya 7 (tujuh) hari setelah titik rekayasa.
 Pasal 12 ayat (3) : Cukup jelas.
 Pasal 13 s.d Pasal 18 : Cukup jelas.

231